

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
 RESOR LOMBOK TIMUR

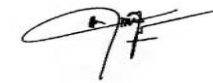
DATA PIRANTI LUNAK SATRESNARоба POLRES LOMBOK TIMUR TAHUN 2016

NO	JENIS	NOMOR/TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1.	PERKAP	NO.22 TAHUN 2011	Administrasi pertanggungjawaban Keuangan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia		
2.	SOP		Penyelidikan dan Penyidikan T.P.Narkoba		
3.	PERKAP	NOMOR 8 TAHUN 2011	Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia		
4.	PERKAP	14 THN 2012	Manajemen Penyidikan Tindak Pidana		
5.	PERATURAN MENKES RI	NOMOR 2415/MENKES/PER/XII/2011	REHABILITASI MEDIS PECANDU, PEYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA		
6.	Keputusan Menteri Kesehatan	Nomor : 347/Menkes/SK/VII/1990	Obat Wajib Apotik		
7.	SKEP	NOMOR: SKEP/7/2003	Petunjuk lapangan analisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Obat Berbahaya		
8.	UU RI	Nomor 3 Tahun 2014	Perindustrian		
9.	UU RI	Nomor 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen		
10.	UU RI	Nomor 7 Tahun 2014	Perdagangan		
11.	PERDA KAB. LOTIM	Nomor 8 Tahun 2002	Larangan memproduksi, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol		
12.	Peraturan Mahkamah Agung RI	Nomor 4 Tahun 2014	Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam system Peradilan Pidana Anak		
13.	UU RI	NOMOR 35 TAHUN 2009	Narkotika dan Peraturan-peraturan pendukung		
14.	UU RI	NOMOR 36 TAHUN 2009	Kesehatan		
15.	UU RI	NOMOR 2 TAHUN 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia		

16.	UU RI	NOMOR 32 TAHUN 2002	PENYIARAN		
17.			Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		
18.			KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)		
19.			Naskah sementara PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN		
20.			Petunjuk Pengajuan Dukgar dan Perwabku Kegiatan Lidik Sidik Tindak Pidana		
21.			Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2016		
22.			Rencana Kerja Kepolisian Resort Lotim T.A.2016		
23.			Rincian Kertas Kerja RKA-KL Pagu definitive TA.2016		
24.			Susunan Organisasi dan Tata Kerja		
25.			Kebijakan Kapolri		
26.			Commander Wish Kapolri		
27.			Naskah Panduan dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri		
28.			Ren aksi 100 hari Penjabaran Program Prioritas		
29.			Tahapan Implementasi Program Prioritas Kapolri		
30.			Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan		
31.			Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa		
32.			Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Polri		
33.			Buku Petunjuk bagi Petugas dalam rangka penanganan kegiatan penyelundupan manusia dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelundupan manusia		
34.			Memahami Pemolisian (Buku pegangan bagi para penggiat HAM)		
35.			Pedoman Pelaksanaan P4GN		
36.			Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak usia dini		
37.			Modul untuk remaja "Mencegah lebih baik daripada mengobati"		
38.			Pembentukan KPA		
39.			Renops Gatarin 2016		
40.			Sosialisasi Hasil kegiatan Perlindungan		
41.			Sop Lidik dan Sidik		
42.			Himpunan peraturan Kapolri bidang operasional		
43.			Pedoman Penyidikan Tindak Pidana		
44.			Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana		
45.			Pedoman Penyidikan Tindak Pidana		
46.			Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana		
47.			Pedoman Penyidikan Tindak Pidana		
48.			Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana		
49.			Pedoman Penyidikan Tindak Pidana		
50.			Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana		
51.			Pedoman Penyidikan Tindak Pidana		
52.			Hukum Kelembagaan Negara		
53.			Pembentukan peraturan perundang-undangan		
54.			Hukum Perdata		
55.			Asas-asas dan Pokok-Pokok Hukum Agraria		
56.			Perkap No.7 tahun 2008		

57.		UU Penyiaran dan Pers		
58.		UU Ketenagakerjaan		
59.		UU Otonomi Daerah		
60.		Hukum Kelembagaan Negara		

KASATRESNARKOBA



PRAYIT HARIYANTO, SH  
AKP NRP 67110385